



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

P E N G U M U M A N

Nomor: 01 Tahun 2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS FORMASI TAHUN 2024

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

II. FORMASI

Jumlah Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diterima sebanyak **158** orang dan rincian formasi sebagaimana terlampir.

1. CPNS Jabatan Fungsional Teknis : 96 Formasi;
2. CPNS Jabatan Fungsional Kesehatan : 62 Formasi;

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
2. Khusus untuk jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah yang terdaftar di Kemendikbudristek dan/atau Kemenag;
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan;
 - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kemendikbudristek;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
12. Pelamar yang melamar pada formasi jabatan fungsional kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih aktif. Daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR dapat dilihat pada lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

13. Pelamar disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
14. Pelamar mendaftar melalui portal SSCASN 2024 pada tautan <https://sscasn.bkn.go.id> dan melengkapi/mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dengan menggunakan **e-meterai**.

IV. KETENTUAN CALON PELAMAR

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN pada formasi tahun anggaran yang sama yaitu PNS atau PPPK
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode formasi tahun anggaran;
3. Pelamar yang berstatus sebagai PPPK aktif dapat melamar pada pengadaan CPNS dengan ketentuan telah bekerja 1 (satu) tahun dan mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Yang Berwenang (PyB);
4. Khusus PPPK Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah memenuhi persyaratan pada poin ke-3 (tiga) ketentuan diatas serta belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun saat mendaftar, apabila ingin mengikuti seleksi CPNS 2024 agar dapat melaporkan diri ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lantai III Kantor Bupati Kepulauan Anambas paling lambat tanggal 03 September 2024 dengan membawa dokumen SK pengangkatan PPPK dan surat permohonan izin mengikuti seleksi CPNS yang di tujukan ke Bupati Kepulauan Anambas Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Pelamar pada pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi SKD CPNS Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan:
 - a. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - b. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - c. Dapat melamar pada Instansi yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - d. Memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
 - e. Pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024;
 - f. Pelamar yang menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.

V. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

1. Tahapan Pelaksanaan Seleksi CPNS T.A 2024 terdiri dari:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar;
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang.
2. Pelaksanaan Seleksi CPNS T.A 2024 dilaksanakan sesuai jadwal oleh Badan Kepegawaian Negara dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 02 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 06 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	09 s.d 15 Oktober 2024
10	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
11	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
12	Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
13	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS	04 s.d 08 Desember 2024
14	Pelaksanaan SKB CPNS	09 s.d 20 Desember 2024
15	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 04 Januari 2025
16	Pengumuman Hasil CPNS	05 s.d 12 Januari 2025
17	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
18	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
19	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
20	Pengumuman Final Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
21	Pengisian Daftar Riwayat Hidup Peserta Kelulusan CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
22	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

Catatan: Apabila terdapat perubahan atau penyesuaian kembali jadwal tahapan kegiatan, akan disampaikan pada lama SSCASN dan pemberitahuannya selanjutnya.

VII. LAIN-LAIN

1. Pelamaran Seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dipungut biaya;
2. Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar pada website <https://sscasn.bkn.go.id> terkait atas NIK dan Nomor Kartu Keluarga, pelamar harus menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai KTP pelamar;
3. Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;

4. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan Perundang-Undangan;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;
6. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dapat melalui pesan *whatsapp* pada nomor 081372588831 / 082173807980 atau datang langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan CPNS dengan alamat Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepulauan Anambas Jalan Raja Haji Fisabilillah Pasir Peti – Tarempa pada hari kerja pukul 09.00 – 15.00 WIB;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

Bupati Kepulauan Anambas



Abdul Haris

**DAFTAR FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 FORMASI TAHUN 2024**

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI DAN JENIS FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
1	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL
2	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN BENCANA
3	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 EKONOMI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	2	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK
5	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA
6	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN
7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA
8	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA
9	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
10	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
11	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PARIWISATA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
12	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 FISIKA / S-1 GEOLOGI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PETERNAKAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 BOKIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 KEHUTANAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN
13	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
14	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIAT INSPEKTORAT DAERAH	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
15	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI DAN JENIS FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
16	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
17	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 PARIWISATA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
18	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PARIWISATA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
19	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
20	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	S-1 PSIKOLOGI / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PETERNAKAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
21	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 FISIKA / S-1 GEOLOGI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PETERNAKAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 BOKIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PARIWISATA / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 KEHUTANAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
22	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
23	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PERIKAMAN PERTANIAN DAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS PERIKAMAN PERTANIAN DAN PANGAN	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PETERNAKAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 BOKIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 KIMIA / S-1 FISIKA
24	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN
25	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG II	S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / D-IV MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK
26	AUDITOR AHLI PERTAMA	4	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG IV	S-1 ILMU POLITIK / D-IV MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 STATISTIKA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK
27	AUDITOR AHLI PERTAMA	3	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG III	S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU HUKUM / D-IV AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK
28	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	2	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG BINA MARGA	D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK GEOLOGI
29	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
30	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	2	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S-1 HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEPERAWATAN / D-IV MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 ILMU MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / S-1 ILMU STATISTIK / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FARMASI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU SOSIOLOGI / S-1 KEFARMASIAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI DAN JENIS FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
31	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL
32	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM
33	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL
34	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	2	-	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN BIDANG PERTANIAN	D-IV PETERNAKAN / D-IV PENYULUH PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 KIMIA / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK
35	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG I	S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU POLITIK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK KOMPUTER
36	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG II	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU POLITIK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI
37	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG IV	S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU POLITIK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK KOMPUTER
38	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG III	S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 SOSIOLOGI
39	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	6	2	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 AKUNTANSI / S-1 AGRIBISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AGRONOMI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 BIOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 BOKIMIA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 GEOLOGI / S-1 FISIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 PETERNAKAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KEHUTANAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FARMASI / S-1 FILSAFAT / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI
40	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP	S-1 ILMU KELAUTAN / D-IV PENYULUH PERIKANAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 ILMU PERIKANAN / D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN / S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN / S-1 PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN / D-IV TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
41	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	2	-	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN BAGIAN HUKUM	S-1 HUKUM
42	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 ADMINISTRASI / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI
43	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	5	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 BIOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 FISIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KIMIA / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 SOSIOLOGI
44	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	4	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAN PRODUK HUKUM DAERAH	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 BIOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 FISIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KIMIA / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 SOSIOLOGI
45	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER
46	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA
47	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI
48	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA
49	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER
50	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	2	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BIDANG PERPUSTAKAAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI / S-1 PERPUSTAKAAN
51	STATISTISI AHLI PERTAMA	1	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA
52	STATISTISI AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA
53	AUDITOR TERAMPIL	1	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG IV	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK SIPIL / D-III STATISTIKA

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI DAN JENIS FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
54	AUDITOR TERAMPIL	1	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG II	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK SIPIL / D-III STATISTIKA
55	AUDITOR TERAMPIL	2	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG I	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK SIPIL / D-III STATISTIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III AKUNTANSI
56	AUDITOR TERAMPIL	2	-	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG III	D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK SIPIL / D-III STATISTIKA
57	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	5	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SLTA/SMA SEDERAJAT
58	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	2	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAN PRODUK HUKUM DAERAH	SLTA/SMA SEDERAJAT
59	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS TAREMPA	PROFESI APOTEKER
60	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD TAREMPA	PROFESI APOTEKER
61	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	PROFESI APOTEKER
62	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD TAREMPA	SPELIALIS BEDAH
63	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD JEMAJA	SPELIALIS PENYAKIT DALAM
64	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD PALMATAK	DOKTER SPESIALIS ANESTESI
65	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD TAREMPA	SPELIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
66	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD PALMATAK	SPELIALIS PENYAKIT DALAM
67	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD PALMATAK	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
68	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS KUTE SIANTAN	PROFESI DOKTER
69	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD PALMATAK	PROFESI DOKTER
70	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS SIANTAN TIMUR	PROFESI DOKTER
71	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS TAREMPA	PROFESI DOKTER
72	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD JEMAJA	PROFESI DOKTER
73	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS JEMAJA BARAT	PROFESI DOKTER
74	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD TAREMPA	PROFESI DOKTER
75	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS JEMAJA TIMUR	PROFESI DOKTER
76	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS PALMATAK	PROFESI DOKTER
77	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS SIANTAN TIMUR	PROFESI DOKTER GIGI
78	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS SIANTAN SELATAN	PROFESI DOKTER GIGI
79	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD TAREMPA	PROFESI DOKTER GIGI
80	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD PALMATAK	PROFESI DOKTER GIGI
81	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS KUTE SIANTAN	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 ILMU GIZI
82	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS TAREMPA	D-IV KEPERAWATAN / NERS SPESIALIS KEPERAWATAN ANAK / NERS SPESIALIS KEPERAWATAN GERIATRI / NERS SPESIALIS KEPERAWATAN JIWA / NERS SPESIALIS KEPERAWATAN KOMUNITAS / NERS SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI / PROFESI NERS
83	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD JEMAJA	D-IV KEPERAWATAN / PROFESI NERS

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI DAN JENIS FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
108	PERAWAT TERAMIPIIL	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS Siantan Timur	D-III KEPERAWATAN
109	PERAWAT TERAMIPIIL	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS Siantan Selatan	D-III KEPERAWATAN
110	PERAWAT TERAMIPIIL	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS TAREMPA	D-III KEPERAWATAN
111	PERAWAT TERAMIPIIL	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS Siantan Tengah	D-III KEPERAWATAN
112	PERAWAT TERAMIPIIL	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS Siantan Utara	D-III KEPERAWATAN
113	PERAWAT TERAMIPIIL	1	-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RSUD PALMATAK	D-III KEPERAWATAN
JUMLAH		155	3		



CONTOH SURAT LAMARAN

....., Agustus 2024

Perihal : Lamaran Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kepada Yth : Bupati Kepulauan Anambas
C.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2024

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor Telp/Handphone :
Email :

Dengan ini mengajukan lamaran menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Adapun formasi
jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ingin saya lamar adalah :

- a. Kualifikasi Pendidikan :
- b. Formasi Jabatan :
- c. Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas - berkas pendukung
sebagai berikut :

1. Scan Asli Ijazah;
2. Scan Asli Transkrip Nilai Akademik;
3. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. Pas Photo warna latar belakang merah ukuran 4 x 6;
5. Surat Pernyataan;
6. Dokumen Pendukung lainnya;

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian Bapak,
saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

E-Meterai
10.000

(.....)

CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

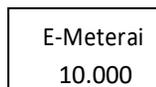
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya , dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,.....2024

Yang membuat,



(.....)

CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGABDI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Tidak akan mengajukan pindah tugas ke luar Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
3. Tidak akan mengajukan pindah dari jabatan fungsional sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. Tidak mengajukan dan pindah tugas dari unit kerja penempatan pertama ke unit kerja lainnya sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
5. Bersedia diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil apabila mengajukan pindah tugas sebelum memenuhi kewajiban mengabdikan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar dan atau tidak saya taati.

.....,2024

Yang membuat pernyataan,

E-Materai
10.000

(.....)

**CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI
SELEKSI BAGI PPPK AKTIF KAB. KEPULAUAN
ANAMBAS**

....., Agustus 2024

Perihal : Permohonan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Formasi T.a 2024

Kepada Yth : Bupati Kepulauan Anambas
C.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NIPPPK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Masa Jabatan PPPK : ...th dan ...bln
Nomor Telp/Handphone :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024. Adapun formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ingin saya lamar adalah :

- a. Kualifikasi Pendidikan :
- b. Formasi Jabatan :
- c. Unit Kerja :
- d. Instansi :

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

E-Meterai
10.000

(.....)